



Pilkada ✓
*Anggaran Panwaslu
Rp 4,7 Miliar*

Tabanan (Bali Post) -

Pemkab Tabanan mengalokasikan Rp 4,7 miliar untuk Panwaslu Tabanan. Hal itu diungkapkan, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Ketut Rudia, Senin (16/3) lalu. Ia mengatakan pihaknya mengajukan Rp 5,2 miliar untuk Panwaslu, namun hanya diloloskan Rp 4,7 miliar.

"Selain tempat, kami juga difasilitasi kantor," ujarnya. Sesuai aturan keanggotaan Panwaslu Kabupaten paling lambat dilantik satu bulan sebelum tahapan pilkada dimulai. Sesuai rencana tahapan pilkada akan digulirkan Mei 2015.

Dalam melakukan pengawasan, Rudia berharap dibantu Satpol PP Tabanan dalam menindaklanjuti eksekusi atas pelanggaran-pelanggaran pilkada yang terjadi selama berlangsungnya tahapan kampanye. "Kewenangan Panwaslu sebatas memberikan rekomendasi. Kami berharap didukung Satpol PP dalam melakukan eksekusi,"

ujarnya, setelah audinesi dengan Bupati Tabanan Eka Wiryastuti.

Bupati Tabanan berharap pelaksanaan pilkada nantinya berjalan aman dan lancar. Untuk mewujudkan tentunya diperlukan koordinasi dari semua pihak terutama dalam penegakan aturan selama pilkada berlangsung.

"Selain karena kewajiban kepala daerah untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada, kami sangat berkepentingan agar pelaksanaannya benar-benar aman dan demokratis. Tidak ada gesekan dan masyarakat bisa memilih tanpa ada intervensi dan intimidasi," ujar Eka.

Menurut Eka, dalam setiap pelaksanaan pemilihan, koordinasi dan komunikasi yang dibangun antara Panwaslu dan Pemkab Tabanan sudah berjalan dengan baik. Namun, pihaknya tidak memungkiri dalam setiap momen pemilihan selalu saja ada masalah yang muncul. (kmb24)

Edisi : Rabu 18 Maret 2015

Hal : 13



Anggota Dewan Minta "X-ray" Dioptimalkan

Denpasar (Bali Post) -

Mengantisipasi potensi gangguan dan ancaman keamanan saat perayaan hari raya Nyepi, sejumlah anggota DPRD Bali mendesak aparat keamanan lebih waspada dan memperketat pengamanan di sejumlah titik khususnya pintu masuk Bali dan kawasan pariwisata. Bahkan, Ketua Komisi I DPRD Bali Ketut Tama Tenaya mendesak pihak Polda Bali mengoptimalkan penggunaan alat pengaman canggih X-ray guna mengamankan pintu-pintu masuk Bali dan sejumlah objek vital.

"Keamanan menjelang dan saat Nyepi bahkan pasca-Nyepi harus tetap terjaga. Kami minta X-ray dioptimalkan agar pengamanan lebih maksimal. Jangan sampai X-ray dibiarkan nganggur," kata Tama Temeya ditemui Selasa (17/3) kemarin usai diskusi

terbatas tentang perayaan Nyepi yang digelar Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Bali.

Politisi PDI Perjuangan asal Nusa Dua itu menambahkan, potensi gangguan keamanan dan bentrok saat *Pangerupukan* atau pengarak-an ogoh-ogoh juga mesti diantisipasi dan dimini-malisasi. Sebab, kegiatan yang menghadirkan banyak massa tersebut rawan bentrokan dan gesekan hori-zontal. Dalam hal ini, desa pakraman dengan pecalang dan tokoh masyarakat setempatnya bisa berada di garda terdepan memastikan keamanan dan ketertiban saat pengarak-an ogoh-ogoh ini. "Kami harapkan jajaran Polda Bali hingga jajaran terbawah bekerja sama dengan pecalang yang menjadi ujung tombak di lapangan mampu mengantisipasi po-tensi bentrok saat *Pangeru-pukan*," tegasnya. (wid)

Edisi : Rabu, 18 Maret 2015

Hal : 9



Dana BOS Naik, Honor Guru Pengabdian Turun

Bangli (Bali Post) -

Naiknya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tahun anggaran 2015 ini membuat sekolah bernapas lega. Pasalnya, kenaikan dana BOS ini dirasa mampu menunjang peningkatan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah menengah pertama. Di sisi lain, kenaikan dana BOS ini tidak begitu berdampak pada guru pengabdian lantaran persentase alokasi honor menurun dari tahun sebelumnya.

Kepala SMPN 1 Bangli Drs. I Wayan Widiana Sandhi, M.Pd., Selasa (17/3) kemarin mengatakan, dana BOS tahun anggaran ini mengalami peningkatan. Sebelumnya, Rp 710 ribu per siswa, namun kini sudah menjadi Rp 1 juta per siswa. "Kami sangat bersyukur dana BOS bisa naik," ujarnya. Dikatakan lebih lanjut, dana BOS ini digunakan untuk membiayai komponen kegiatan sekolah.

Saat ini, SMPN 1 Bangli masih kekurangan buku untuk perpustakaan. Dana BOS ini salah satunya digunakan untuk pengembangan perpustakaan, pembelian buku teks pelajaran. Selain itu, dana BOS digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, menunjang kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik dan lain sebagainya.

Kenaikan dana BOS yang diterima sekolah ini sepertinya tidak akan terlalu dirasakan bagi guru pengabdian yang sumber gajinya dari dana BOS. Pasalnya, persentase untuk alokasi pembayaran gaji guru pengabdian di sekolah negeri turun. Tahun 2014, batas maksimum untuk honor guru pengabdian adalah 20 persen dari total dana BOS, sedangkan tahun ini menjadi 15 persen. "Dana BOS naik, tapi persentase untuk guru pengabdian menurun," katanya. (kmb45)

Edisi : Rabu, 18 Maret 2015

Hal : 10



Dugaan Korupsi BBM

Mantan Kadisperindag Minta Bebas

Denpasar (Bali Post) -

Setelah dituntut hukuman penjara selama setahun enam bulan, majelis hakim tipikor yang diketuai Cening Budiana memberikan kesempatan pada terdakwa Dra. Ni Made Ayu Ardini, M.Si. untuk melakukan pembelaan. Dalam pledoinya, Senin (16/3), terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya, Achmad Wahyudi, Ketut Madra dan Wayan Sumardika, pada pokoknya mohon supaya dibebaskan dari segala tuntutan. Alasannya, unsur-unsur yang dituntutkan jaksa tidak terpenuhi.

"Begitu juga soal uraian soal unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi," tandas Madra bersama Sumardika. Karena unsur pasal-pasal dalam dakwaan jaksa tidak terpenuhi, maka tim kuasa hukum terdakwa meminta supaya Ni Made Ayu Ardini dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan primer maupun subsider. "Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat," katanya.

Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Jembrana itu dinyatakan bersalah oleh JPU. JPU Darmawan dan Sauca di depan majelis hakim pimpinan Cening Budiana dalam tuntutan-nya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider. Oleh karenanya, dalam perkara korupsi BBM itu terdakwa dijerat Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. "Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan (1,5) dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan penjara," tuntutan jaksa.

Di samping itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti secara tanggung renteng bersama I Made Sueca Antara (berkas terpisah) sebesar Rp 261.248.412,79. (kmb37)

Edisi : Rabu, 18 Maret 2008

Hal : 3



Rencana PT TWBI di Lombok

Gubernur NTB Nilai Lebih Banyak Ruginya

"Apalagi merusak, itu kita tidak toleransi. Kita ingin daerah kita ini bisa terjaga terus, bisa diwariskan ke generasi berikutnya dengan kondisi yang baik."

Gubernur NTB
Dr. TGH M. Zainul Majdi

UNTUK mereklamasi 700 hektar Teluk Bena, PT TWBI berencana mengambil material dari Lombok Timur. Tak hanya pasir laut, juga batuan. Atas dua rencana itu, Gubernur NTB Dr. TGH M. Zainul Majdi langsung menolaknya.

Ditemui Selasa (17/3) kemarin, Gubernur menilai kegiatan pertambangan itu akan mendegradasi kualitas lingkungan. Artinya, aktivitas pengambilan pasir laut itu justru lebih besar ruginya daripada manfaatnya.

Hal. 23
Lebih Besar



Bali Post/Suara NTB

BAHAS Pengerukan - Sejumlah kades di Lombok Timur, Senin (16/3) menggelar pertemuan membahas rencana penyedotan pasir.

Edisi : Rabu, 18 Maret 2015

Hal : 1



Lebih Besar

Dari Hal. 1

“Sampai saat ini kami (Pemprov NTB) menolak (pengerukan pasir laut). Karena kemudatannya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya,” tegas Zainul Majdi usai menghadiri acara Pekan Panutan Pajak DJP Nusa Tenggara di Mataram.

Gubernur menjelaskan, pada tahun 2014, PT TWBI mengajukan izin untuk melakukan pengerukan batuan di Kecamatan Pringgabaya, Lotim. Namun rencana itu ia tolak. Hal ini sesuai dengan surat dengan No. 660/240/1/BLHP/2014 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Penilaiab Amdal Pusat Kementerian Lingkungan Hidup. Gubernur menolak secara tegas rencana itu.

Pasalnya, kebijakan tata ruang wilayah NTB dengan jelas mengatur pembangunan di Pulau Lombok dilakukan dengan pendekatan pulau yang membatasi kegiatan pertambangan.

Sesuai dengan rencana, jumlah material yang akan dikeruk sekitar 20 juta meter kubik. Jumlah itu, ekuivalen atau setara dengan membuka lahan sekitar 40 hektar sampai 50 hektar dengan kedalaman 40 mter. Sementara untuk pengerukan pasir laut di perairan Lotim, akan mengeruk sekitar 23 juta meter kubik.

Kata Gubernur, wilayah Lombok dan Sumbawa, khususnya Pulau Lombok merupakan pulau kecil yang harus tetap dijaga keseimbangan ekosistemnya.

“Apalagi merusak, itu kita tidak toleransi. Kita ingin daerah kita ini bisa terjaga terus, bisa diwariskan ke generasi berikutnya dengan kondisi yang baik,” imbuhnya.

Karena itu, upaya eksploitasi sumber daya alam di daerah ini harus dipastikan betul tidak merusak lingkungan. Apalagi jumlah material yang akan dikeruk cukup besar, di atas 20 juta meter kubik. (nas)



Kasus Korupsi di RPH Temesi

Kejadian Sudah Lama, Terdakwa Banyak Lupa

HINGGA akhir pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus dugaan korupsi Rumah Potong Hewan (RPH) di Temesi, Gianyar, mantan Camat Gianyar yang saat ini menjabat Sekda Gianyar I.B. Gaga Adi Saputra tidak menghadiri panggilan jaksa untuk tiga terdakwa dalam perkara ini. Di Pengadilan Tipikor, ketidakhadiran Gus Gaga menjadi pertanyaan dan perbincangan hangat. Namun dalam sidang sebelumnya, kesaksian Gus Gaga sudah dibacakan.

Sementara mantan Bupati Gianyar Cok Budi Suryawan hadir memenuhi panggilan jaksa. "Pak Sekda ada tugas keluar dan sudah bersurat," kata JPU Herdian Rahadi kala itu.

Selasa (17/3) kemarin, perkara ini sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi meringankan (*undercharge*), dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa A.A. Rai Asmara yang mantan Sekda Gianyar sekaligus Ketua Panitia Pengadaan Lahan dan I.B. Raka, mantan Kadis Peternakan dan Sekertaris Pengadaan Lahan. Di hadapan majelis hakim pimpinan Early Sulistyorini, Gung Asmara lebih banyak mengatakan lupa dengan alasan kejadian tersebut sudah terjadi sangat lama, yaitu pada 2002.

Dia mengatakan tidak terlalu mengingat jelas pengadaan lahan untuk RPH Temesi yang akhirnya menjadi kasus korupsi ini. Namun, Asmara mengakui jika saat itu dirinya menjabat sebagai Sekda Gianyar dan Ketua Panitia

Pembebasan Lahan. Ketika ditanya terkait pembentukan panitia dan tugas-tugas panitia pada saat itu, Asmara kembali mengatakan tidak ingat. Ia hanya mengatakan jika SK panitia tersebut dibuat Bagian Hukum dan ditandatangani oleh Bupati Gianyar saat itu, Cok Budi Suryawan. "Jelasnya saya tidak ingat. Itu sudah lama sekali," katanya.

Sementara I.B. Raka yang saat itu menjabat sebagai Kadis Peternakan dan Sekertaris Panitia lebih gamblang menjelaskan terkait kasus korupsi yang terjadi 13 tahun silam tersebut. Bahkan, Raka yang didampingi kuasa hukumnya, Suryatin Lijaya dkk., masih menyimpan beberapa dokumen terkait pengadaan lahan yang berada di bawah Dinas Peternakan itu. (asa)

Edisi : Rabu, 18 Maret 2015

Hal : 3